

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Wabah virus Covid-19 di berbagai belahan dunia tidak terkecuali Indonesia hingga saat ini masih terus mengalami perkembangan. Upaya demi upaya dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat sendiri dalam menghadapi dan membatasi penyebaran luasan virus covid-19. Upaya yang dilakukan ialah dengan pembatasan sosial berskala besar, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), social distancing, dan salah satu upaya besar lainnya yaitu dengan vaksinasi. Menurut (Iksan & Abdi, 2020) pada kuartal pertama tepatnya pada tahun 2020 pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi tingkat global. Pada saat itu pandemic covid-19 menyerang berbagai belahan dunia hampir 2 tahun yang menyebabkan keadaan dunia semakin buruk. Tidak terhenti sampai disitu, bahkan ditemukannya virus virus baru yang berpindah dari virus Covid. Oleh karena hal tersebutlah para pihak berwenang dalam hal ini pemerintah harus dapat mengeluarkan kebijakan kebijakan yang dapat mencegah penyebaran virus covid-19 semakin berkembang luas.

Wabah Covid-19 memicu terciptanya kebijakan PPKM ini. Pemberlakuan PPKM tentu menimbulkan pengaruh yang sangat luar biasa bagi pelaku ekonomi tak terkecuali pada pedagang di pasar tradisional. Kendati demikian dalam penelitian ini peneliti akan terfokus pada dampak PPKM terhadap pedagang perempuan. Dimana, jika dilihat dari perspektif feminisme pedagang perempuan sangatlah merasakan dampaknya. Pada studi kasus peneliti kali ini yaitu pasar tradisional palimo selama diterapkannya kebijakan PPKM ini menciptakan persaingan dagang yang sangat luar biasa. Sebagian besar berpendapat laki-laki lebih membutuhkan uang mengingat statusnya sebagai kepala keluarga. padahal nyatanya dengan paham atau konsep feminisme perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bekerja atau mencari nafkah.

Kepala Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal SPd MM mengatakan bahwa selama berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang, mengakibatkan penurunan jumlah pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan mencapai 5% dengan skala buka hanya seminggu 2 kali atau bahkan tidak buka sama sekali karena pedagang beranggapan lebih baik tutup dibandingkan buka namun tidak mendapatkan penghasilan. Meskipun jumlah pedagang hanya berkurang sebesar 5% namun dapat dikatakan omset menurun disebabkan berkurangnya jumlah pembeli pada pasar tradisional selama masa PPKM. (Larassati, 2021)

Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, resiko kehilangan pekerjaan bagi kaum perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, Menteri PPPA berpendapat pandemi Covid-19 ini dapat menimbulkan peningkatan kesenjangan atau ketidaksetaraan gender di Indonesia. Data menunjukkan, sebesar 53% perempuan usia kerja di Indonesia berpartisipasi dalam angkatan kerja, sedangkan jumlah laki-laki yang berpartisipasi dalam angkatan kerja menyentuh angka 82%. (Prihatin, 2022a)

Melihat kepada penelitian terdahulu (Qomariah, 2019) didapati hasil Saat kaum perempuan terjun ke dunia kerja dengan status tenaga kerja, perempuan selalu dipandang sebelah mata dan dianggap secara ekonomi kaum perempuan masih bergantung pada suami yang menyebabkan perempuan mendapatkan upah yang rendah, status yang rendah dan hanya diberikan pekerjaan paruh waktu. Impelemntasi diskriminasi terhadap kaum perempuan menimbulkan rendahnya tingkat keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja yang mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja.

Dengan demikian, seharusnya menjadi perempuan atau ibu tidak semata mata hanya berdiam diri di dalam rumah. Mengingat banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan diluar rumah, seperti bekerja menjadi pekerja pemerintahan, buruh tani, pedagang di pasar tradisional dan lain sebagainya. Selain itu juga, dilihat dari perspektif feminisme perempuan harus memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara tanpa perlu adanya pembedaan.

Ketua Bidang Kajian Penelitian dan Pengembangan DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Badrussalam mengatakan “aktivitas perdagangan telah terganggu dalam durasi hampir sebulan sejak PPKM Darurat dimulai pada 3 Juli 2021. Sementara itu, sekitar 6,7 juta atau 57% pedagang pasar yang masih beroperasi melaporkan penurunan pendapatan sekitar 70% sampai 90% jika dibandingkan dengan situasi normal.” (Perwitasari, 2021)

Menteri PPPA menyebutkan “Data menunjukkan penghasilan laki- laki di Indonesia 20-23% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ketidaksetaraan gender tersebut tidak hanya dipicu oleh perbedaan pendidikan ataupun kelihaihan, namun juga sebagian besar berasal dari hasil diskriminatif, dimana keyakinan peran yang dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki.” (Prihatin, 2022b)

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Dampak Kebijakan PPKM Terhadap Pedagang Perempuan Dilihat Dari Perspektif Feminisme (Studi Kasus Pedagang Perempuan di Pasar Tradisional Palimo Palembang)

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan ialah sebagai berikut

- Bagaimana Dampak Kebijakan PPKM Terhadap Pedagang Perempuan Dilihat Dari Perspektif Feminisme (Studi Kasus Pedagang Perempuan di Pasar Tradisional Palimo Palembang)

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

- Untuk mengetahui Dampak Kebijakan PPKM Terhadap Pedagang Perempuan Dilihat Dari Perspektif Feminisme (Studi Kasus Pedagang Perempuan di Pasar Tradisional Palimo Palembang)

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah manfaat akademis dan manfaat praktis :

#### 1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan juga wawasan bagi semua pembaca tidak terkecuali penulis mengenai “Dampak Kebijakan PPKM Terhadap Pedagang Perempuan Dilihat Dari Perspektif Feminisme (Studi Kasus Pedagang Perempuan di Pasar Tradisional Palimo Palembang)”, dan juga diharapkan dapat jadi landasan kemajuan ilmu pengetahuan secara teoritis.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis dalam setiap tahapan proses terjadinya penelitian ini. Selain itu bagi pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan penelitian mengenai Dampak Kebijakan PPKM Terhadap Pedagang Perempuan Dilihat Dari Perspektif Feminisme (Studi Kasus Pedagang Perempuan di Pasar Tradisional Palimo Palembang) ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan.

#### 1.5. Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Tinjauan Pustaka disini berarti yaitu penelitian terdahulu yang dimana berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya agar tidak mengulangi kesalahan penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk peneliti melakukan penelitian:

No	Judul	Penulis	Jurnal	Hasil Penelitian
1.	PENGARUH PENERAPAN PPKM DARURAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENURUNAN	(Nasruddin & Yansari, 2021)	Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam,	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya PPKM menimbulkan dampak yang cukup besar bagi para pelaku UMKM selama terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan pendapatan yang didapatkan oleh para pelaku

	PENDAPATAN UMKM (Studi Kasus pada Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Sukodadi, Lamongan)		Volume 2, Isu 1, Tahun 2022 <a href="http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/sosebi/article/view/5373/1858">http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/sosebi/article/view/5373/1858</a>	UMKM. Dimana, sebelum terjadinya pandemic covid 19 dan penerapan PPKM para pelaku UMKM bisa mendapatkan lebih dari Rp300.000 setiap harinya, namun pada saat PPKM dilakukan para pelaku UMKM mengalami penurunan yang cukup merosot yaitu kurang dari Rp300.000.
2.	EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN JAM OPERASIONAL BAGI SEKTOR UMKM DI KOTA SURABAYA	(Wahyu, A. K., Putra, Y. R. K., Utami, R. W. S., & Hertati, 2021)	Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik, Volume 2 Nomor 2 Mei 2021 <a href="http://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/viewFile/30/34">http://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/viewFile/30/34</a>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jam operasional yang terbilang dalam pelaksanaan PPKM Mikro bagi UMKM masih kurang efektif, hal ini terlihat dari respon para pelaku UMKM yang sangat keberatan dengan pelaksanaan jam operasional yang mengakibatkan kerugian. Bagi pelaku UMKM meski implementasinya telah mampu menekan angka penyebaran COVID 19 di Kota Surabaya.
3.	Analisis Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19	(Agustin & Solikin, 2021)	Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 20 No. 1 Maret 2022 <a href="https://ejournal.bsi.ac.id/ej">https://ejournal.bsi.ac.id/ej</a>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan dan menganggap bahwa perempuan tidak mampu bekerja untuk membantu kesejahteraan keluarga, padahal nyatanya dengan perempuan yang bekerja akan membantu perekonomian

			<a href="http://jurnal/index.php/perspektif/article/view/1605/5266">urnal/index.php/perspektif/article/view/1605/5266</a>	keluarganya. Keterlibatan perempuan dalam sektor domestik tidak terlepas dari tuntutan ekonomi keluarga. Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menjadi motivasi bagi para ibu rumah tangga untuk berperan aktif membantu mengatasi permasalahan ekonomi keluarga dengan melakukan berbagai pekerjaan, baik di rumah maupun di luar rumah.
4.	SOSIAL EKONOMI DAN KONDISI KERJA PEREMPUAN PEDAGANG MAKANAN KAKI LIMA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI JAKARTA	(Yusuf et al., 2021)	JURNAL KELITBAN GAN, Volume 9 No. 3 <a href="https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/265/184">https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/265/184</a>	Hasil penelitian menunjukkan kehidupan sehari-hari perempuan pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19 ditandai dengan kondisi kerja yang lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 berlangsung, di mana 96% dari pedagang mengatakan pendapatannya menurun dari sebelum pandemi Covid-19. Penelitian juga menunjukkan rata-rata net income pedagang menurun lebih dari 30%.
5.	KIPRAH PEREMPUAN SEBERANG KOTA JAMBI DALAM PENINGKATAN	(Maryani, 2021)	Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6 No. 1 Juni 2021	Hasil dari penelitian ini adalah sebagian masyarakat masih ada pandangan yang menganggap bahwa perempuan tidak mampu bekerja untuk kesejahteraan keluarga. Keterlibatan perempuan

	KESEJAHTERAA N KELUARGA		<a href="https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/An-Nisa/article/view/2021.61.27-40/495">https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/An-Nisa/article/view/2021.61.27-40/495</a>	dalam sektor domestik tidak terlepas dari tuntutan ekonomi keluarga. Ditengah pandemi Covid-19, masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menjadi motivasi bagi para ibu rumah tangga untuk berperan aktif membantu mengatasi permasalahan ekonomi keluarga dengan melakukan berbagai pekerjaan, baik di rumah maupun di luar rumah.
6.	GENDER DI MASA KRISIS:  TELAAH REFLEKSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREMPUAN	(Kurniawan, 2021)	Jurnal Equalita, Volume (3), Issue (1), Juni 2021  <a href="https://www.jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/8378/3761">https://www.jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/8378/3761</a>	Hasil menunjukkan bahwa secara umum pandemi Covid-19 ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan pada hampir seluruh penduduk dunia, khususnya bagi kaum perempuan termasuk ketimpangan perlakuan dalam bidang ekonomi. Selain itu, peranan pemerintah daerah dianggap masih kurang dalam membantu mengurangi dampak dari PPKM tersebut.
7.	Perspektif feminisme dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia	(Alvado et al., 2021)	Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu- Ilmu Sosial, Vol. 1 No. 6, Tahun 2021	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan yang mampu membuktikan dan meraih kesuksesan sebagai pemimpin. Peran perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia dari

			<a href="http://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/399/404">http://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/399/404</a>	segala aspek menunjukkan bahwa perempuan juga mampu dan layak menjadi pemimpin.
8.	EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TERHADAP ADAT DAN KEBIASAAN MASYARAKAT DI DESA ADAT MENYALI KABUPATEN BULELENG	(Wiradinatha et al., 2022)	Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022 <a href="https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jurnal_konsum/article/view/4841/3429">https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jurnal_konsum/article/view/4841/3429</a>	Hasil penelitian menunjukkan PPKM memberikan dampak pada aktivitas masyarakat di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng. Menurutnya, PPKM masih kurang efisien yang memberikan dampak pada beberapa wilayah dan juga aktivitas adat. Selain itu juga pada masa PPKM peranan pemerintah sangatlah diperlukan namun pada kenyataannya masyarakat desa menganggap pemerintah kurang berperan aktif dalam mengatasi dampak dari diberlakukannya PPKM.
9.	FEMINISME DAN KETAHANAN PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA DI INDONESIA DAN ISLANDIA	(Hasanah et al., 2020)	Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 13, No. 1, April 2020 <a href="https://media.neliti.com/media/publications/340199-feminisme-dan-">https://media.neliti.com/media/publications/340199-feminisme-dan-</a>	Hasil dari penelitian adalah feminisme semakin lama semakin berkembang dan diakui oleh dunia. Feminisme dan ketahanan perempuan di dua negara ini sudah menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peluang besar dalam perkembangan dunia kerja, politik dan bidang lainnya.



			<a href="#">ketahanan-perempuan-dalam-fbde1368.pdf</a>	
10.	Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia Analysis	(Nuraeni & Suryono, 2021)	Jurnal Ilmu Pemerintahan ,Vol. 20 No. 01 Tahun 2021  <a href="https://nakho-da.ejournal.u-nri.ac.id/index.php/njip/article/view/134/150">https://nakho-da.ejournal.u-nri.ac.id/index.php/njip/article/view/134/150</a>	Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, namun seiring waktu ketimpangannya semakin mengecil. Untuk meningkatkan kesetaraan gender masih ada beberapa hambatan secara institusi maupun sosial budaya, peraturan kesetaraan gender masih kurang optimal ditegakkan, masih rendahnya kesadaran dari pekerja terhadap hak-haknya, serta rendahnya posisi tawar pekerja perempuan. Selain itu perlu meningkatkan kesadaran atas hak kesetaraan gender angkatan kerja perempuan dan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perempuan di sektor informal.

**Tabel 2 Tinjauan Pustaka Terdahulu**

Berdasarkan dari literatur review di atas, peneliti juga semakin tertarik untuk membedah bagaimana Dampak Kebijakan PPKM Terhadap Pedagang Perempuan Dilihat Dari Perspektif Feminisme (Studi Kasus Pedagang Perempuan di Pasar Tradisional Palimo Palembang) di mana pada penelitian yang peneliti lakukan memiliki beberapa perbedaan dan kebaruan riset. Selain tempat dan lokasi penelitian yang berbeda dengan yang ada pada penelitian terdahulu, peneliti ingin melengkapi penelitian yang pernah dilakukan dengan mengedepankan paham feminisme dalam penelitian ini. Dengan begitu, berangkat dari beberapa literature

review yang telah ada, maka peneliti berharap agar penelitian yang dijalani ini nantinya akan berjalan dengan baik.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Analisis Dampak Kebijakan**

#### **1.6.1.1. Analisis Dampak**

##### **1. Pengertian Analisis**

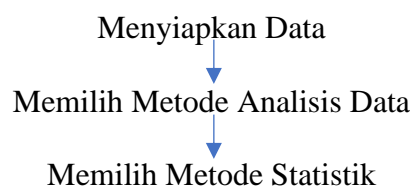
Analisis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan megurai hal pokok yang terdiri dari beberapa bagiannya yang kemudian satu bagian tersebut ditelaah untuk mendapatkan keterkaitan antar bagian dan memperoleh pengertian yang tepat dan juga sama secara keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memaknai analisis sebagai suatu tindakan meyelidiki suatu peristiwa guna memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dapat dikatakan bahwasannya tidak ada dasar hukum yang hanya terfokus dalam Analisis namun secara keseluruhan dituangkan kedalam peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 27 tahun 1999 mengenai analisis dampak lingkungan hidup.

Menurut Komarudin dalam (Sitanggang, 2022) mendefinisikan analisis sebagai:

*“suatu proses untuk berpikir dalam upaya penguraian secara keseluruhan yang kemudian dibentuk menjadi beberapa bagian kecil yang diharapkan dapat mengenali tanda dari beberapa bagian, lalu keterkaitan antar bagian, dan juga fungsi dari setiap bagian yang ada didalam satu keseluruhan yang terstruktur.”*

##### **2. Tahapan- Tahapan dalam Melakukan Analisis dengan Tepat**

Tentunya dalam proses analisis haruslah dilakukan dengan tepat. Hal tersebut sebagai upaya untuk terciptanya suatu analisis yang sesuai dengan tujuan. Berikut tahapan dalam analisis secara tepat:



### 3. Pengertian Dampak

Dampak dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu hal yang memiliki pengaruh yang kuat dalam menciptakan terjadinya sesuatu hal yang dapat berupa hal positif ataupun hal negative. Selain itu, dampak juga dapat diartikan sebagai suatu yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil suatu keputusan dalam aktivitas ilmiah maupun non ilmiah.

Menurut Hikmah Arif (2009 : 10 ) dan Waralah Rd Cristo (2008 : 12 ) dalam (Hariyati, 2015) mendefinisikan dampak sebagai berikut :

*“Dampak dimaknai sebagai sesuatu yang ada akibat dari sesuatu yang terjadi. Dampak dapat bersifat berat dikarenakan terdapat konsekuensi dari sebelum maupun sesudah terjadinya sesuatu. Sesuatu yang muncul karena adanya sesuatu dan memiliki pengaruh yang sangat kuat yang dapat memberikan sifat positif dan negative”.*

#### **1.6.1.3. Kebijakan**

##### 1. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) “juga menyarankan bahwa kebijakan dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas yang cukup banyak berhubungan dengan konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dibandingkan sebagai keputusan yang berdiri sendiri”. Kebijakan sendiri tertuang dalam (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 (Permenpan 2007).

Kebijakan (*policy*) dapat dimaknai sebagai instrument dalam pemerintahan, tidak hanya dalam makna Government yang berarti aparatur negara, namun dapat dimaknai sebagai Governance yang juga berperan dalam pengelolaan sumber daya public. Kebijakan sendiri dapat disimpulkan sebagai sebuah keputusan yang

dikeluarkan atau Tindakan yang dilakukan guna memperbaiki suatu kondisi pengolahan dan juga pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan juga manusia dengan tujuan utama yaitu kepentingan yang bersifat public.

Menurut Suaib (2016) Kebijakan (policy) ialah sebagai berikut:

*“pada dasarnya suatu kebijakan dikeluarkan guna menciptakan suatu pilihan yang paling penting dalam upaya meperkokoh suatu kehidupan. Suatu kebijakan dibuat haruslah terbebas dari makna konotasi atau tercakup didalam kata politis (political), dimakna makna tersebut dimaknai sebagai sesuatu yang memihak suatu kepentingan tertentu. Kebijakan haruslah diciptakan secara konsisten dan juga berulang, baik dari pihak yang menciptakan kebijakan tersebut maupun yang menjalankan kebijakan. Adapun kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.”*

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Jika dilihat dari ruang lingkupnya pemahaman mengenai kebijakan public sangatlah luas hal tersebut diakibatkan dari banyaknya sector yang mencakup kebijakan public seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu jika kita meilihat dari hierarkinya kebijakam public juga memiliki sifat nasional, regional, dan juga local.

(Taufiqurokhman, 2014) mengartikan kebijakan public sebagai berikut:

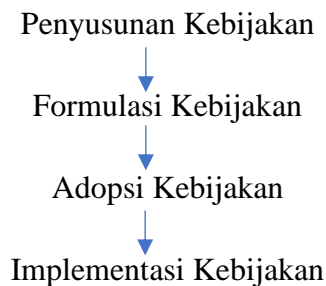
*“kebijakan publik dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan selalu mengambil perhatian public. Kebijakan public tidak selamanya muncul dengan cepat. Namun, kebijakan public dapat muncul setelah melewati proses cukup Panjang atau bahkan proses yang sulit. Oleh karena kompleksnya suatu masalah tersebutlah suatu keputusan akan menciptakan suatu kebijakan.”*

Thomas R Dye dalam Islamy (2009: 19) mengartikan kebijakan publik sebagai berikut:

*“is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Makna tersebut mengarahkan kebijakan public bukan bata suatu pernyataan dari pejabat pemerintah saja melainkan mengacu pada suatu perwujudan. Selain itu pemerintah berhak untuk tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan public karena memiliki pengaruh (pengaruh yang sama jika pemerintah memilih untuk melakukannya ataupun tidak.”*

### 3. Tahapan- Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan public dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan yang kompleks. Dimana berdasarkan hal tersebut dalam proses penyusunan suatu kebijakan tersebut tentunya memiliki tahapan- tahapannya. Tahapan-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) sebagai berikut:



### 4. Factor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Pembuatan kebijakan tentunya didasari oleh beberapa factor yang mempengaruhinya. Hal tersebut tentunya suatu hal yang terjadi dan harus diwaspadai dengan pembuatan kebijakan public merupakan salah satu antisipasi yang dapat dilakukan. Factor yang mempengaruhi kebijakan public menurut (Suharno: 2010: 52-53) ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Pembuatan kebijakan juga dapat terjadi karena pembuat kebijakan harus mampu membuat kebijakan karena adanya tekanan-tekanan dari luar dan juga mampu memenuhi tuntutan dari luar.

- b. Terdapat pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama pada suatu forum tertentu. Dimana kebiasaan tersebut dapat meliputi kebiasaan investasi modal yang sampai kini belum berjalan maksimal yang kemudian kebiasaan tersebut dapat dicontoh oleh administrator. Kemudian jika terjadi terus menerus hal tersebut dinilai pantas untuk diikuti yang kemudian menciptakan suatu kebijakan public.

- c. Terdapat pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

- d. Terdapat pengaruh dari kelompok luar

Pengaruh dari lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar tentu akan sangat mempengaruhi para pembuat kebijakan menciptakan kebijakan.

- e. Terdapat pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan terdahulu akan mempengaruhi seseorang dalam pembuatan kebijakan.

## **1.6.2. Pandemi Covid 19**

### **1. Pandemi Covid-19**

Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Pandemi Covid-19 terjadi karena ada penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius dan virulensi tinggi (Wandra et al., 2021). Berdasarkan kementerian Kesehatan Indonesia,

perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause”. Berdasarkan data dari BNPB dilaporkan bahwa jumlah orang yang positif terinfeksi virus Covid-19 meningkat terus setiap hari. Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada sektor perekonomian di Indonesia. Kemudian atas dasar hal tersebutlah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 mengenai Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

## 2. Kebijakan Selama Pandemi Covid-19

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 tentunya pemerintah berperan untuk menciptakan suatu kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemic Covid-19 sendiri meliputi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM. Dimana dalam pemberlakuan kebijakan tersebut memicu terjadinya kebijakan-kebijakan lainnya seperti Work From Home (WFH), pembelajaran secara daring, penutupan pusat- pusat perbelanjaan yang memicu terjadinya keramaian.

Berdasarkan artikel pada (Covid-19.go.id) mengatakan bahwa:

*“Pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan sebagai upaya penanggulangan terkait pandemic Covid-19. Dengan focus utama kebijakan upaya pencegahan ditengah lingkungan masyarakat, dengan menitikberatkan pada tiga focus utama yaitu di lingkungan pemukiman, pada jalanan, dan aktivitas diluar rumah.”*

## 3. Praktik Kerja Lapangan

Pada hakikatnya pemerintah pastinya memiliki harapan yang besar terhadap Implementasi di lapangan terkait kebijakan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah selama masa Pandemi. Pada implementasi nya bisa dikatakan sudah cukup baik dan berhasil dalam beberapa sector. Seperti misalnya, kebiasaan menjaga kebersihan terhadap masyarakat semakin baik, untuk menerapkan jaga

jarak pada ruang tertutup dan lain sebagainya. Meskipun demikian jika melihat pada aspek ekonomi kebijakan tersebut dapat dikatakan kurang berhasil bahkan memicu terjadinya penurunan angka perekonomian,

Menurut (Hanifa & Fisabilillah, 2021) mengatakan bahwa :

*“Meskipun pada kenyataannya implementasi di lapangan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi perekonomian pada masa pandemic ini masih mengalami banyak tantangan. Diharapkan dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mampu mewujudkan realisasi yang nyata adanya dalam menciptakan public goods yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.”*

### **1.6.3. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

#### **1. Pengertian PPKM**

PPKM sendiri merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM masuk kedalam MENDAGRI Nomor 1 Tahun 2021. PPKM dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi atau menghadapi pandemic Covid-19. Menurut (Wiradinatha et al., 2022) Pemerintah dalam memberlakukan kebijakan PPKM harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

#### **2. Aturan- aturan dalam PPKM**

Tentunya pemberlakuan PPKM ini memiliki aturan aturannya tersendiri. Menurut (Munirah et al., 2021) Berlakunya penerapan PPKM membuat seluruh aktivitas masyarakat dibatasi yang tentunya berkaitan dengan adanya penyebaran virus Covid-19. Meliputi, kegiatan pembelajaran secara online/ during, penerapan WFH (75%), pemberlakuan protocol kesehatan dengan ketat di tempat umum, penghentian sementara kegiatan kegiatan yang ada pada fasilitas umum dan lain sebagainya yang menyangkut khalayak ramai dan umum. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan protokol kesehatan ketat sesuai aturan pemerintah daerah.



### 3. Pelaksanaan dan dampak dari PPKM

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sendiri merupakan salah satu upaya yang diciptakan oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pelaksanaan PPKM tersebut dapat dikatakan cukup efektif dalam upaya penurunan angka Covid-19 di Indonesia. Namun, dengan pelaksanaan PPKM tersebut menimbulkan dampak yang negative pula dalam aspek perekonomian. (Napitu et al., 2020) “Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro haruslah dilakukan atas pertimbangan yang cukup mengingat pada masanya sejumlah daerah masih memiliki risiko sangat tinggi dan menjadi episentrum peningkatan kasus COVID-19.”

Menurut (Agus Kurniawan, 2021) mengatakan bahwa:

*“UMKM merupakan salah satu sector perekonomian yang terkena dampak dari PPKM. Terkhusus PPKM darurat pada 3 Julis – 25 Juli 2021, dimana dalam implementasinya ditargetkan pengurangan kasus terkonfirmasi perhari nya dibawah 10 ribu kasus, dengan diikuti beberapa kebijakan lainnya seperti penutupan pusat perbelanjaan atau perdagangan, rumah ibadah yang tidak diizinkan melakukan ibadah secara berjamaah dan tempat- tempat lainnya yang dapat menciptakan khalayak ramai.”*

Pada teori kebijakan Publik selama diberlakukannya masa PPKM ini penulis sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh (Taufiqurokhman, 2014) sebagai berikut “kebijakan publik dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan selalu mengambil perhatian public. Kebijakan public tidak selamanya muncul dengan cepat. Namun, kebijakan public dapat muncul setelah melewati proses cukup Panjang atau bahkan proses yang sulit. Oleh karena kompleksnya suatu masalah tersebutlah suatu keputusan akan menciptakan suatu kebijakan.” Penulis beranggapan bahwasannya pendapat yang dikemukakan tersebut sangat sesuai dengan yang sedang penulis teliti. Dimana, kebijakan PPKM ditengah pandemic Covid- 19 sangatlah menyita perhatian public. Kebijakan PPKM sendiri muncul setelah beberapa lama terjadinya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia yang dirasa sudah sangat meresakan masyarakat. Kemudian, pada akhirnya sebagai

Langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia kebijakan PPKM mulai diterbitkan oleh pemerintah.

#### **1.6.4. Feminisme**

##### **1. Feminisme**

Feminisme Dalam paham feminisme menuntut keadilan dan juga perlakuan yang sama bagi perempuan. Teori feminisme dapat diartikan sebagai teori yang membahas perspektif perempuan mengenai kehidupan sosialnya (Aliyah et al., 2018). Penganut paham feminisme meyakini bahwa pemberian hak dan juga kesempatan yang sama antara kaum perempuan dan juga laki laki meliputi pekerjaan, hak politik, dan juga tak terkecuali hak dalam rumah tangga merupakan sebuah keharusan. “Feminisme dilihat dari kaca mata filosofi memiliki makna yang lebih dalam dari hanya sekadar protes akan kesetaraan dan kebebasan (Ilaa, 2021)”. Oleh atas dasar itu peneliti ingin meneliti peran ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga jika dipandang dari perspektif feminisme. Selain itu terdapat dasar hukum mengenai hak-hak perempuan untuk menjamin hak nya tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender yang tertuang pada pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Najmah dan Khatimah Sai'dah dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan (2003:34) mendefinisikan feminisme sebagai berikut:

*“Feminisme merupakan perilaku diskriminatif dan eksploitasi terhadap kaum Wanita yang dilakukan atas kesadaran diri yang terjadi baik dalam lingkungan kerja, keluarga, serta di lingkungan masyarakat. Diiringi juga dengan kesadaran individual untuk merubah keadaan yang ada dengan leksikal. Feminisme juga merupakan aksi yang meminta kesamaan hak bagi kaum perempuan dan juga kaum laki-laki tanpa perbedaan sedikitpun.”*

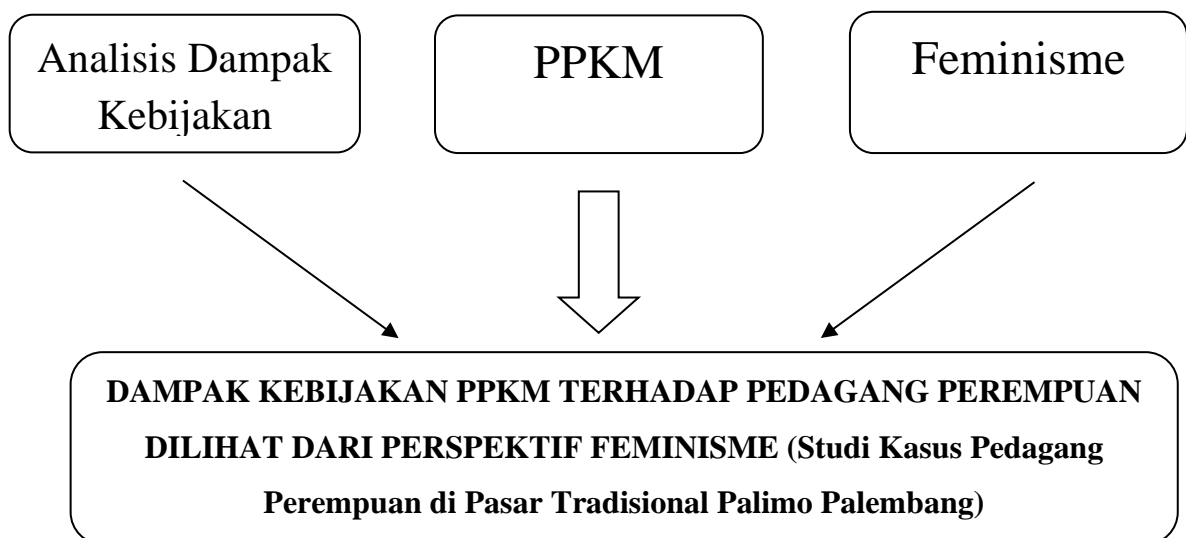
(Suhada, 2021) mendefinisikan feminisme sebagai berikut:

*“Feminisme dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang dibentuk oleh kaum perempuan dalam rangka menyuarakan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini dianggap Sebagian masyarakat sebagai suatu hal yang merugikan kaum perempuan. Dimana,*

*sebagaimana berpendapat seorang perempuan akan selalu berada pada kaum minoritas jika dibandingkan dengan laki- laki yang atas dasar hal tersebutlah kesempatan bagi perempuan dalam segala hal semakin menipis.”*

Pada teori feminisme ini penulis setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Suhada, 2021) yang berisi “Feminisme dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang dibentuk oleh kaum perempuan dalam rangka menyuarkan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini dianggap sebagian masyarakat sebagai suatu hal yang merugikan kaum perempuan. Dimana, sebagaimana berpendapat seorang perempuan akan selalu berada pada kaum minoritas jika dibandingkan dengan laki- laki yang atas dasar hal tersebutlah kesempatan bagi perempuan dalam segala hal semakin menipis.” Dimana, pendapat tersebut sangatlah selaras dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Penulis juga berpendapat yang sama yaitu feminisme dapat dimaknai sebagai gerakan kaum perempuan dalam rangka menyuarkan ketidaksetaraan gender terhadap kaum perempuan. Perempuan selalu dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, padahal dengan perempuan yang bekerja akan sangat membantu perkenomian keluarganya. Dimana, berdasarkan hal tersebutlah gerakan feminisme dapat membantu perempuan dalam menyuarkan hak hak nya tanpa terkecuali.

#### **1.6.5. Kerangka Pemikiran (Olahan Peneliti)**



Gambar Bagan Kerangka Pemikiran Olahan Peneliti

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai DAMPAK KEBIJAKAN PPKM TERHADAP PEDAGANG PEREMPUAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF FEMINISME (Studi Kasus Pedagang Perempuan Di Pasar Tradisional Palimo Palembang), yang mana dalam penelitian ini peneliti akan melihat mulai dari analisis dampak kebijakan PPKM terhadap pedagang perempuan, kemudian akan dilihat dari perspektif feminis nya dalam dampak kebijakan PPKM terhadap pedagang perempuan (perspektif feminis) di pasar tradisional palimo, Palembang).

### **1.7. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **1.7.1. Analisis Dampak Kebijakan**

Analisis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengurai hal pokok yang terdiri dari beberapa bagiannya yang kemudian satu bagian tersebut ditelaah untuk mendapatkan keterkaitan antar bagian dan memperoleh pengertian yang tepat dan juga sama secara keseluruhan.

Dampak dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu hal yang memiliki pengaruh yang kuat dalam menciptakan terjadinya sesuatu hal yang dapat berupa hal positif ataupun hal negative. Selain itu, dampak juga dapat diartikan sebagai suatu yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil suatu keputusan dalam aktivitas ilmiah maupun non ilmiah.

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

#### **1.7.2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

PPKM sendiri merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM sendiri masuk kedalam MENDAGRI Nomor 1 Tahun

2021. PPKM merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna untuk penanganan Covid- 19 yang bertujuan mengurangi laju penyebaran virus Covid-19 di Indonesia yang juga didukung dengan pengurangan atau pembatasan aktivitas masyarakat dalam ruang public yang akan sangat berpotensi dalam menyebarkan virus covid-19.

### 1.7.3. Paham Feminisme

Paham Fenimise sendiri erat dikaitkan dengan paham yang mengedepankan dan pemberian azas kebebasan terhadap kaum perempuan. Feminisme dalam paham feminisme menuntut keadilan dan juga perlakuan yang sama bagi perempuan. Penganut paham feminisme meyakini bahwa pemberian hak dan juga kesempatan yang sama antara kaum perempuan dan juga laki laki meliputi pekerjaan, hak politik, dan juga tak terkecuali hak dalam rumah tangga merupakan sebuah keharusan. Dimana perempuan berhak mendapatkan keadilan dan hak yang sama, tak terkecuali dalam memiliki hak untuk bekerja dan mencari nafkah. Dengan ibu (perempuan) yang bekerja akan sangat menegakkan paham kesetaraan gender dilihat dari perspektif feminis.

### 1.8. Definisi Operasional

Definisi Operasional yakni indikator-indikator dalam mengukur variable penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Definisi operasional akan mempermudah dalam menganalisis data dengan menyajikan gejala- gejala yang akan diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Berikut gejala yang dipilih menjadi definisi operasional, sebagai berikut oleh pemerintah guna mengatasi atau menghadapi pandemic Covid-19 (Wiradinatha et al., 2022) :

Variabel	Indicator	Parameter
Analisis Dampak Kebijakan PPKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Publik</li> <li>• Faktor yang mempengaruhi</li> <li>• Perubahan Kegiatan Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberhasilan suatu kebijakan</li> <li>• Pembatasan jam Operasional pada pasar tradisional/ supermarket</li> <li>• Kegiatan berbelanja menjadi online</li> </ul>

Pandemi Covid- 19 & Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Selama Pandemi Covid-19</li> <li>• Praktik Kerja Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan suatu kebijakan salah satunya dengan PPKM</li> <li>• Sudah cukup berhasil di beberapa sector</li> <li>• Mengurangi frekuensi mobilitas selama PPKM</li> </ul>
Feminisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian hak yang sama</li> <li>• Tingkat partisipasi pedagang perempuan selama PPKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paham Feminisme menuntut keadilan dan juga perlakuan yang sama bagi perempuan</li> <li>• Penurunan tingkat partisipasi pedagang perempuan selama PPKM</li> <li>• Penurunan penghasilan pedagang terkhususnya pedagang perempuan selama masa PPKM berlaku</li> </ul>

## 1.9. Metode Penelitian

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan jenis penelitian lapangan (field research) dimana penelitian yang dilakukan ialah penelitian dalam situasi alamian. Dimana, dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti mengumpulkan data- data yang bersumber langsung dari lapangan atau lokasi tempat penelitian, yaitu pasar tradisional Palimo, Palembang.

Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan memberikan gambaran informasi mengenai dampak kebijakan PPKM terhadap pedagang perempuan dilihat dari perspektif feminisme (studi kasus pedagang perempuan di pasar tradisional Palimo Palembang).

### 1.9.2. Informan/subyek Penelitian

Dalam pemilihan informan/subyek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan strategi pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang akan kita harapkan, atau mungkin sebagai pelaku peristiwa yang diteliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Pada penelitian ini yang akan menjadi informan/subyek penelitian adalah Kepala Pasar Tradisional Palimo Palembang, pedagang perempuan yang menjadi pedagang di pasar tradisional palimo.

**Tabel 1.1 Identitas Subjek Penulisan**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Bpk. H	48 tahun	S1	Kepala Pasar Tradisional Palimo Palembang
2	Ibu R	37 tahun	SMA	Pedangang Sayur Perempuan Pasar Tradisional Palimo Palembang
3	Ibu Z	43 tahun	SMA	Pedangang Ayam Potong Perempuan Pasar Tradisional Palimo Palembang
4	Ibu H	51 tahun	SMP	Pedangang Sayur Perempuan Pasar Tradisional Palimo Palembang
5	Ibu F	39 tahun	SMA	Pedangang Sembako Perempuan Pasar Tradisional Palimo Palembang
6	Ibu Y	54 tahun	SMP	Pedangang Buah Perempuan Pasar Tradisional Palimo Palembang

Sumber : Diolah Penulis

### **1.9.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Palembang di lingkup Pasar Tradisional Palimo Palembang, Jl. Kolonel H. Burlan No.54, Ario Kemuning, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena peneliti melihat persaingan yang ketat antar pedagang pada masa PPKM ini dan juga jumlah pedagang perempuan yang dikategorikan cukup banyak di pasar tradisional palimo.

### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer dan juga sekunder dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### **1. Observasi**

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendengaran, panca indra dalam hal ini penglihatan dalam upaya untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Guna untuk mendapatkan gambaran nyata di lapangan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dan juga untuk menjadi jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan.

Observasi ini dapat menjadi bahan acuan oleh peneliti untuk mengetahui latar belakang, situasi pasar pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dengan mencatat segala peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan tujuan penelitian di pasar tradisional Palimo, Palembang.

#### **2. Wawancara**

Menurut Moleong (2009: 186), wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh sedikitnya 2 pihak yang terjadi dengan maksud atau tujuan tertentu. Terdiri dari pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden, yaitu kepala pasar tradisional palimo Palembang, pedagang perempuan



di pasar tradisional palimo. Dimana, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Kemudian, ditunjukkan kepada objek maupun subjek penelitian Wawancara yang dilakukan dibantu dengan alat seperti telepon genggam, sebagai perekam percakapan, alat tulis, dan alat bantu lainnya.

### 3. Dokumentasi

Menurut Moleong (2009: 216) “dokumentasi merupakan bahan yang tertulis ataupun film yang berasal dari rekaman yang tidak disiapkan atas dasar permintaan dari seorang penyidik. Dokumentasi dapat diartikan sebagai meote mengumpulkan data atau informasi yang dilakukan dengan suatu pencatatan atau menguti data secara langsung di lokasi penelitian. Bentuk dari dokumen sendiri meliputi surat- menyurat, arsip, notulensi, modul, buku, dan beberapa catatan lainnya. Selain itu pengambilan gambar di lapangan yang berkaitan dengan dampak kebijakan PPKM terhadap pedagang perempuan di pasar tradisional Palimo juga dapat menjadi bahan pendukung lainnya dalam metode dokumentasi.”

#### **1.9.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1984:23) dalam (Nursyafitri, 2022). Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

##### a) Pengumpulan Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Terdapat tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

##### b) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara merangkum dan kemudia memilih suatu hal yang pokok dan hanya focus kepada hal yang dinilai penting dan kemudian mulai menentuka tema dan pola nya. Dimana nantinya data yang sudah di reduksi dapat menjadi gambaran nyata dan sesuai yang akan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada tahapan selanjutnya

dan sewaktu-waktu data diperlukan penulis akan dengan mudah mencari data tersebut. Dapat disimpulkan reduksi data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk memilih dan memisahkan hal-hal yang pokok dari beberapa data yang sudah dikumpulkan.

#### c) Penyajian Data

Kemudian, setelah tahapan reduksi data berhasil dilakukan penulis harus menyajikan data. Pada penelitian kualitatif proses penyajian data dapat disajikan berupa bagan, uraian singkat, keterkaitan antar kategori dan sebagainya. Proses ini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam memahami kondisi yang terjadi di lapangan jika masing-masing data sudah ditampilkan dan disusun menjadi bagan ataupun struktur.

#### d) Penarikan Kesimpulan

Pada proses mengumpulkan data, peneliti haruslah meneliti, memahami dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah sebab dan akibat yang ditimbulkan. Dimana, dalam hal ini simpulan awal hanyalah bersifat sementara, yang nantinya akan berubah jika tidak ditemukannya bukti kuat yang dapat menjadi pendukung pada tahapan proses pengumpulan data selanjutnya. Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. (Miles & Huberman, 1992).

### Tugas Pokok

#### 1. Kepala Pasar

- a. Memantau hasil pendapatan tarif jasa pasar.
- b. Memantau kebersihan pasar
- c. Memantau ketertiban dan keamanan pasar.
- d. Menempatkan pedagang sesuai dengan jenis pedagang.

#### 2. Staf Pasar

- a. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam pembinaan pengembangan pasar dan pedagang lainnya.

- b. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan terhadap pungutan
  - c. Pemeliharaan ketertiban dan kebersihan pasar.
3. Bendahara Pasar
- a. Memantau pemungutan tarif jasa pasar tiap-tiap jasa.
  - b. Menyetorkan hasil penarikan taif jasa ke Bank yang telah ditentukan atau ditunjuk.
4. Bidang Administrasi
- a. Merekap seluruh jumlah administrasi yang diterima, seperti pembukuan atau merekap hasil penarikan tarif jasa pasar.
  - b. Pelaporan administrasi.
5. Bidang Jasa Harian
- a. Memungut atau menarik tarif jasa pasar perhari.
  - b. Serta membantu kepentingan secara umum.
6. Bidang Jasa Kebersihan
- a. Menarik tarif jasa kebersihan.
  - b. Membersihkan sampah yang ada di dalam pasar.
  - c. Serta membantu kepentingan secara umum.
7. Bidang Jasa Ketertiban dan Keamanan
- a. Menarik tarif jasa Ketertiban dan Keamanan
  - b. Serta membantu kepentingan secara umum.
8. Bidang Jasa Jaga Malam
- a. Menarik tarif jasa jaga malam.
  - b. Menjaga keamanan pasar pada saat malam hari